

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Istilah Hubungan Internasional telah berkembang pesat pada akhir abad ke-19. Para pakar Hubungan Internasional telah memberikan definisi bahwa Hubungan Internasional sederhananya adalah interaksi lintas batas negara antar-aktor Hubungan Internasional.

Hubungan internasional yang pada awalnya hanya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian memperluas bentuk kajiannya yaitu untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan juga kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (Rudy, 2003: 51).

Segala bentuk interaksi antar-aktor Hubungan Internasional terjadi dengan melintasi batas-batas geografis negara. Terdapat lima unsur yang merupakan unsur pokok dalam pembelajaran tentang Hubungan Internasional, yaitu:

1. Sifat dan pelaksanaan system kenegaraan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan (*power*) dari suatu negara

3. Posisi internasional dan politik luar negeri negara-negara besar
4. Sejarah hubungan internasional
5. Pembentukan suatu tertib dunia (*world order*) yang lebih stabil

(Darmayadi, 2015:26)

“Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Evans & Newham dalam Perwita & Yani, 2014 : 3-4)

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh semua negara di dunia, karena dunia berkembang dan persoalan antarnegara pun semakin membawa negara pada suatu bentuk ketergantungan antarnegara satu sama lain. Hubungan atau interaksi antarnegara pun mengalami perkembangan sehingga aktor hubungan internasional tidak hanya negara (*state actor*), tetapi juga aktor bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

2.1.2 Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antarbangsa untuk adanya media melaksanakan kerjasama internasional. (Perwita & Yani, 2014:91).

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional dalam bukunya “Administrasi dan Organisasi Internasional” sebagai berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2009:3).

Berdasarkan definisi diatas, maka organisasi internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkungnya melingkupi batas-batas negara
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
3. Mencakup hubungan antarpemerintah maupun non-pemerintah
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009:3)

2.1.3 Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana.

Menurut Sukirno dalam Perwita dan Yani, bahwa bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-lembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu (Ikbar, 2007:188).

Program bantuan luar negeri ini bersifat saling menguntungkan. Pihak penerima memperoleh bantuan baik itu berupa dana, perlengkapan, maupun pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Saat ini masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Teknik pemberian bantuan dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dengan kata lain, pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (*government to government*) atau melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Terdapat empat motivasi dari negara atau lembaga para pemberi bantuan dalam memberikan bantuan, diantaranya:

1. Motivasi kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi
2. Motivasi politik yang merumuskan tujuan untuk meningkatkan citra negara atau lembaga pemberi bantuan
3. Motivasi keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara atau lembaga pemberi bantuan
4. Motivasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara atau lembaga pemberi bantuan (Perwita & Yani, 2014:84)

Uni Eropa mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara anggotanya yang belum maju dan juga kepada

negara-negara berkembang, meskipun prioritasnya ditekankan pada bantuan terhadap negara miskin. Namun di dalam kasus krisis Ekonomi, Uni Eropa lebih intensif dalam menjalankan program bantuan luar negerinya baik berupa Pinjaman atau hibah terutama ketika kawasan Eropa terkena dampak krisis ekonomi global yang memberikan dampak buruk terhadap negara anggota Uni Eropa itu sendiri, Maka dari itu tanggung jawab UE memberikan bantuan ekonomi kepada negara anggotanya.

2.1.4 Regionalisme

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan (Perwita & Yani, 2014:104).

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukakan regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik, keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme

sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2014:110).

Uni Eropa adalah organisasi regional yang dibentuk negara-negara yang ada dalam kawasan benua Eropa. Ini sejalan dengan salah satu syarat anggota Uni Eropa yaitu negara yang bersangkutan secara geografis harus berada dalam lingkup benua Eropa. Dari segi budaya, negara-negara Eropa pada umumnya memiliki budaya yang seragam yaitu budaya liberalis-kapitalis. Hal inilah yang mendorong negara menjalin kerjasama dengan negara Eropa lainnya lewat perdagangan antarnegara karena setiap negara saling membutuhkan. Atas dasar itulah negara-negara Eropa membentuk suatu organisasi regional bernama *European Union* (EU) atau Uni Eropa.

2.1.5 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam ruang lingkup internasional. (Perwita & Yani, 2014:75). Secara lebih lengkap, ekonomi politik internasional didefinisikan sebagai studi tentang saling keterkaitan antara interaksi fenomena politik dan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. (Mas’oed, 2003 : 4).

Dengan kata lain, ekonomi politik adalah hasil interaksi antara kajian ekonomi dengan kajian politik, yang mempertimbangkan serta dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan kondisi kehidupan sosial masyarakat serta pola kebijakan pemerintah sebagai unsur politik yang satu sama lain saling beririsan.

Joan E. Spero mengemukakan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami ekonomi politik internasional, yaitu:

“Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan “*who gets what, when, and how?*”. Ekonomi internasional merupakan perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang bersifat ekonomi-politik internasional” (Perwita & Yani, 2014:76)

Hal ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik dengan ekonomi internasional setiap negara atau sebaliknya.

2.1.6 Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi adalah suatu keadaan ketika seluruh sektor ekonomi, baik global maupun pada suatu negara, mengalami keruntuhan atau penurunan. Sederhananya krisis ekonomi adalah keadaan dimana sebuah negara mengalami masalah finansial yang sangat berat sehingga rakyat tidak lagi percaya dan mendukung pemerintah. Lebih jauh rakyat kemudian enggan menyimpan uangnya di bank sehingga bank mengalami kesulitan uang tunai. Jika hal itu terjadi, maka bank sentral akan mencairkan asetnya untuk menalangi semua bank itu. Setelah itu maka harga-harga akan naik seiring dengan banyaknya uang tunai di masyarakat akibat bank kelebihan uang tunai.

Ada beberapa konsep tentang krisis-krisis ekonomi yang pernah terjadi di dunia, diantaranya :

1. Krisis Produksi : Krisis yang terjadi dalam bentuk penurunan produksi domestik secara mendadak dari sejumlah komoditas pertanian yang menjadi konsumsi utama banyak pihak, contohnya padi atau beras. Dampak langsung dari krisis semacam ini adalah menurunnya pendapatan masyarakat di wilayah-wilayah sumber produksi tersebut. Krisis ini juga merambat pada industri lain yang pada praktiknya membutuhkan bahan dari pertanian tersebut. Tentu akan ada penurunan juga pada industri tersebut. Dalam tipe ini, dampak krisis terhadap meningkatnya kemiskinan berupa perubahan-perubahan harga atau inflasi, menurunnya jumlah kesempatan kerja, serta berkurangnya tingkat pendapatan.
2. Krisis Perbankan : Krisis ini menitikberatkan permasalahan pada kelemahan bank dalam mengelola keuangan perbankan. Salah satu pihak yang terkena dampak besar adalah perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada bank untuk pembiayaan kegiatan bisnis mereka. Karena krisis ini, mereka tidak dapat mendapatkan pinjaman dari bank karena bank sendiri mengalami masalah. Opsi lain adalah mereka bisa mendapatkan pinjaman, namun dengan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga pada keadaan normal. Tidak menutup kemungkinan dalam keadaan seperti ini beberapa perusahaan memilih untuk

melakukan pemutusan hubungan kerja agar bisa membayar bunga yang lebih tinggi.

3. Krisis Nilai Tukar : Krisis ini terjadi jika sebuah mata uang mengalami perubahan atau penurunan yang sangat besar dan cenderung mendadak terhadap mata uang lain. Dampak yang akan dirasakan langsung adalah aktivitas ekspor dan impor pada negara tersebut.
4. Krisis Perdagangan : Krisis ini berasal dari sumber-sumber eksternal. Ada dua pembagian utama, yaitu investasi arus modal serta aktivitas perdagangan yaitu ekspor dan impor. Secara khusus mengenai ekspor misalnya adalah ketika harga di pasar internasional dari komoditas yang diekspor turun secara drastis atau permintaan dunia terhadap komoditas tersebut menurun secara signifikan. Tentu hal ini akan mempengaruhi negara eksportir yang mengalami penurunan secara signifikan.
5. Krisis Modal : Krisis ini terjadi karena adanya pengurangan modal dalam jumlah yang besar atau penghentian bantuan maupun pinjaman luar negeri. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan dana tersebut tentu hal ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan dalam negeri mereka. (Tambunan, 2000:4 – 21)

2.2 Kerangka Pemikiran

Krisis ekonomi yang terjadi di Yunani dalam 1 dekade ini adalah suatu fenomena global yang menarik untuk diamati, karena merupakan salah satu isu yang sangat besar pada lingkup internasional. Secara mendasar fenomena ini dapat diamati

dengan mengacu pada teori maupun konsep hubungan internasional. Hal ini karena apa yang terjadi pada Yunani secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak bagi dunia internasional serta melibatkan beberapa aktor HI lain, baik aktor negara maupun non-negara.

Teori hubungan internasional dalam hal ini menjelaskan bagaimana aktor negara maupun non-negara saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya. Terkait krisis Yunani ini sendiri, teori hubungan internasional dapat membantu menjelaskan interaksi antar aktor yang terlibat di dalamnya, yaitu Yunani sebagai subjek utama, lalu para kreditor yang memberikan bantuan pinjaman luar negeri untuk membantu menangani krisis, serta negara-negara lain yang sejak sebelum krisis terjadi sudah menjalin hubungan kerjasama dengan Yunani.

Teori tentang krisis ekonomi menjelaskan bagaimana suatu negara pada akhirnya bisa mengalami krisis. Teori ini juga menjelaskan beberapa klasifikasi krisis ekonomi negara serta latar belakangnya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk memahami krisis ekonomi di Yunani secara tepat dan mendalam.

Bila dikaitkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Uni Eropa dan Yunani, dapat disimpulkan bahwa krisis utang dimana Yunani sebagai negara yang terkena dampak krisis ekonomi paling buruk melakukan peminjaman dana kepada Bank Sentral Eropa untuk mengantisipasi krisis ini berkepanjangan dan nilai tukar yang melanda zona Eropa menjadi babak baru ekonomi negara-negara Eropa menuju resesi. Krisis ini pada perkembangannya melanda hampir seluruh negara-negara Eropa

pengguna mata uang Euro. Krisis tersebut berawal dari kredit macet di Yunani yang kemudian berdampak luas bagi negara-negara Eropa lain. Negara-negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terkena imbas dari krisis tersebut. Euro kemudian tertekan dan mengakibatkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara di zona Euro.

Bermula sejak tahun 2009, Yunani yang pada awalnya mengalami ketidakstabilan ekonomi karena terkena dampak krisis global terus mengalami angka penurunan. Pemerintah dirasa lemah dalam mengelola keuangan negara yang sederhananya memiliki hutang yang lebih banyak dibanding pendapatan negaranya.

Setelah berbagai upaya negosiasi, Yunani mendapatkan beberapa kali pinjaman luar negeri dari kreditor Troika dengan bunga dan jangka waktu yang ditentukan, namun dengan syarat pencairan dana yaitu Yunani harus menerapkan beberapa kebijakan khusus yang diminta kreditor Troika pada negaranya. Pemerintah menyetujui dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru bagi warganya, yaitu kebijakan yang berkonsep untuk penghematan dan pemotongan anggaran rutin tertentu, serta kebijakan batas transaksi pada perbankan.

Pada lingkup ini, dapat dianalisis bahwa fenomena krisis Yunani adalah bentuk dari ekonomi politik internasional. Dalam hal ini, Yunani mengalami krisis yang jelas merupakan suatu masalah ekonomi, lalu dalam upaya penyelesaiannya Yunani diharuskan untuk menyetujui syarat-syarat politik tertentu dari pihak yang memberikan bantuan pinjaman, serta harus menerapkan kebijakan politik yang baru di negaranya. Bahkan dalam urusan politik dalam negeri pun, pemerintah mengalami masalah

internal yang semakin meningkatkan protes anti-pemerintah dan memperburuk keadaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena krisis Yunani ini erat kaitannya dengan konsep ekonomi politik internasional.

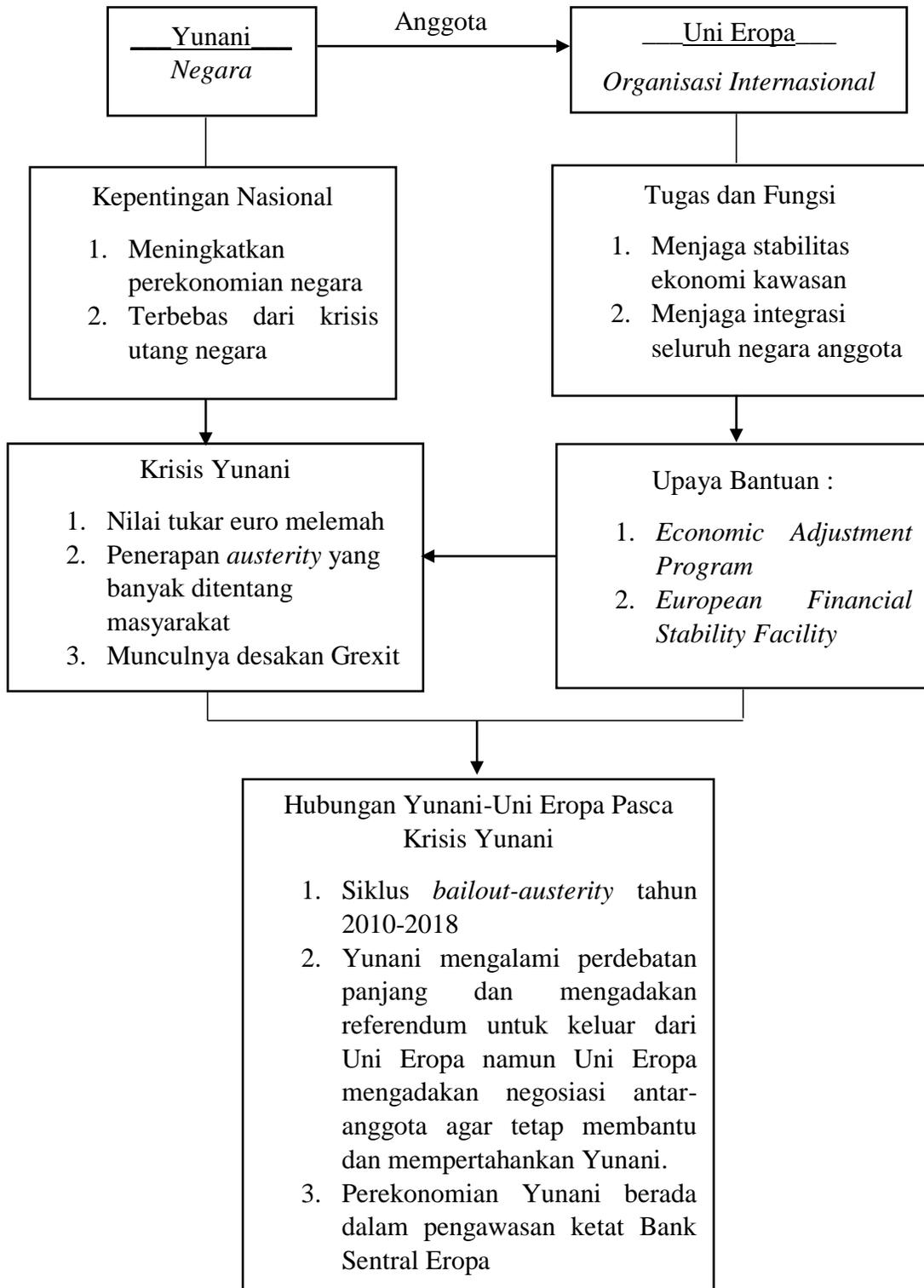
Selama krisis terjadi, tentu Yunani mengalami ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah dihadapkan pada tenggang waktu pembayaran utang luar negeri dan bunganya, lalu keuangan perbankan yang bermasalah, serta menangani masalah ekonomi dalam negeri yang terus meluas. Dalam upaya menyelesaikan masalah krisis yang terjadi, Yunani yang merupakan anggota dari Uni Eropa tentu melakukan upaya terdekat dengan memohon bantuan pada Uni Eropa sebagai tempat bernaung selama ini. Sementara Uni Eropa yang merupakan sebuah konsep dari integrasi terdiri atas beberapa negara di dalamnya, sehingga ketika ada suatu hal buruk yang menimpa salah satu negara, maka tentu akan berdampak pada integrasi tersebut.

Dalam perkembangannya permasalahan ini kemudian meluas hingga memunculkan isu *Grexit* atau mengeluarkan Yunani dari Uni Eropa, karena banyak dijumpai keberatan sesama anggota Uni Eropa yang khawatir mengalami kerugian karena terus-menerus membantu Yunani, namun Uni Eropa terus membantu Yunani dengan memberikan 3 kali *bailout* bahkan melakukan negosiasi antar anggota Uni Eropa terkait isu *Grexit* ini. Meskipun jika ditelusuri, Yunani ternyata telah melakukan rekayasa data keuangan sejak mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti memilih konsep hubungan internasional, organisasi internasional, bantuan luar negeri, ekonomi politik

internasional, regionalisme, serta krisis ekonomi sebagai konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini.

Berikut adalah alur pemikiran peneliti berdasarkan kerangka pemikiran di atas:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran